

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, Mohamad S, 2009, Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Alat Angkut Tahun 2010 – 2014, Kementerian Perindustrian, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan (Pendekatan Ekonomi-Politik)*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- Kosasih, Engkos, dan Hananto Soewedo, 2012, *Manajemen Perusahaan Pelayaran: Suatu Pendekatan Praktis dalam Bidang Usaha Pelayaran Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meleong, Lexy J, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ma'ruf, Buana, 2014, *Strategi Pengembangan Industri Kapal Nasional Berbasis Teknologi Produksi dan Pasar Domestik*. BPPT Press, Jakarta.
- Purwaka, Tommy H, 1993, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia: Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran Antar Pulau*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridhwan, Masagus M., Angsoka Yorintha Paundralingga, Rakhmat Pratama, dan Yenny Fridayanti, 2016, *Working Paper Analisis Neraca Jasa: Studi Kasus Industri Transportasi Maritim*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.A Abbas, 1993, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswoyo, 1995, *Usaha Pelayaran di Indonesia Setelah Paket November 21 Tahun 1988*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Sritomo, 2003, *Pengantar Teknik dan Manajemen Industri*, Guna Widya, Surabaya.
- Umar, Husseyn, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia Buku III*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

Hasbullah, Masyur, *Strategi Penguatan Galangan Kapal Nasional Dalam Rangka Memperkuat Efektifitas Dan Efisiensi Armada Pelayaran Domestik Nasional 2030*, Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan (JR TK), Vol.14, No.1, Januari - Juni 2016.

Habibie, Sudirman, M. Dikdik Gumelar, dan Rudy Sitorus, *Pengembangan Klaster Industri Perkapalan Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Perkapalan Nasional*, M.P.I. (67-76) BPPT, Vol.9, No 2, Agustus 2015.

INCAFO, *Sewindu Memerahputihkan Birunya Lautan Indonesia*, ILUNI FTUI, Jakarta, 2013.

M. Kusumaatmadja, *Pembinaan Pelayaran Nasional dalam Rangka Penegakan Wawasan Nusantara*, yang dikutip dari Graciella Eunika Sumenda, *Keberadaan Asas Cabotage Terhadap Perusahaan Angkutan Laut Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7, September 2017.

HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Hidayanto, Bintang Taufik, 2011, *Analisis Yuridis Atas Penerapan Azas Cabotage Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Putri, Febriza, 2013, *Penerapan Asas Cabotage Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Terhadap Kapal Penunjang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Rum, Dirajaya Patuan, 2017, *Implementasi Asas Cabotage Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Industri Angkutan Laut Nasional Dan Penerapannya Dalam Mendukung Kebijakan Tol Laut*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

PUBLIKASI PEMERINTAH

- Kementrian PPN Bappenas, 2015, *Laporan Implementasi Konsep Tol Laut*, Jakarta.
- Kementerian Pariwisata, 2018, *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2015 – 2018*, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, 2010, *Data Statistik Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2009*, Jakarta.
- _____, 2011, *Kajian Pemahaman Asas Cabotage dan Penerapannya di Berbagai Negara*, Jakarta.
- _____, 2017, *Laporan Akhir Tahun 2016*, Jakarta.
- _____, 2018, *Data Potensi Perusahaan Angkutan Laut dan Armada Tahun 1990-an hingga tahun 2017*, Jakarta.
- _____, 2018, *Data Potensi Perusahaan Keagenan Kapal Asing Tahun 2017*, Jakarta.
- _____, 2018, *Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Khusus Tahun 1990-an hingga tahun 2017*, Jakarta.
- _____, 2018, *Statistik Perhubungan 2015 – 2018*, Jakarta.

MAKALAH

- Darmansyah, Wakil Ketua Umum INSA, *Kesiapan Kapal Nasional Untuk Memenuhi PM No. 82 Tahun 2017 dan Perubahannya PM No. 80 Tahun 2018*, yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Hotel Merlynn Park, Jakarta, pada tanggal 22 November 2018.
- Direktorat Lalu Lintas dan Perhubungan Laut yang disampaikan pada Rapim Direktorat Jenderal Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Jakarta.

WEBSITE

- Cf. *Black's Law Dictionary 6th Edition* hlm. 202, ter kutip dalam Mike Igbokwe, *Advocacy Paper For The Promulgation of a Nigerian Maritime Cabotage Law*, diakses dari <http://www.mikeigbokwe.com> pada 11 Oktober 2016
- Faisal, Karnali, “50 Tahun Samudera Indonesia: Ketika Pemerintah Mematikan Pelayaran Nasional (5)”, https://www.kompasiana.com/karnalifaisal/50-tahun-samudera-indonesia-ketika-pemerintah-mematikan-pelayaran-nasional-5_54f406ef7455137a2b6c854e diakses pada 24 Januari 2018
- Maulana, Rivki, “Pelayaran Nasional Siap Sambut *Beyond Cabotage*”, <http://industri.bisnis.com/read/20141003/98/262154/perhubungan-laut-potensi-besar-kinerja-rendah> diakses pada tanggal 14 Desember 2017

Perkasa, Surya, “Indonesia dan Poros Maritim Dunia”,
<http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/eN4Q7g7b-indonesia-dan-poros-maritim-dunia> diakses pada 24 Januari 2018

Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5328/Indonesia-Kembangkan-Industri-Perkapalan> diakses pada 9 Desember 2018

Badan Pusat Statistik, <https://webapi.bps.go.id> diakses pada Desember 2018.

Pejabat Pengelola Informasi dan Data, Kementerian Perhubungan,
<http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&kategori=Statistik-Perhubungan> diakses pada Agustus 2018.

Widodo, Joko, Presiden Jokowi Jelaskan Konsep Sebenarnya Tol Laut,
<http://setkab.go.id/presiden-jokowi-jelaskan-konsep-sebenarnya-tol-laut/>
pada tanggal 9 Desember 2018

Kementerian Sekretariat Negara, https://indonesia.go.id/?page_id=30598 diakses
pada tanggal 17 September 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64)

Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26)

Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 124/M-Ind/Per/10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha Di Bidang Transportasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 310)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966)



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha Di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 539)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1520)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 491)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1009)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355)